BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kebijakan Dan Teori

Bab ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan beserta beberapa referensi dari jurnal ilmiah yang digunakan untuk mendukung penelitian mengenai ruang terbuka hijau

2.1.1 *SLR. Systematic Literature Review*

Merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik. Tujuan SLR. Penelitian SLR dilakukan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik, dengan pertanyaan penelitian tertentu yang relevan.

2.1.2 Ruang Terbuka Hijau

Adanya suatu ruang terbuka hijau di perkotaan sebagai tempat fungsi utama sosial sebagai fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta menjalin komunikasi antar masyarakat perkotaan, ekonomi dan konservasi alam berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-paru perkotaan yang memberikan oksigen dan penyerap polusi udara, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan keindahan visual perkotaan yang memberi ciri dalam membentuk wajah kota, dan unsur dalam penataan arsitektur perkotaan di dalam wilayah perkotaan yang dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota, seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologi, dan konservasi hayati. (Imansari and Khadiyanta, 2015). Tipologi ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya terbagi menjadi RTH Publik dan RTH Privat. Penjabaran jenis RTH yang termasuk dalam masing-masing tipologi tersebut adalah sebagai berikut (Imansari and Khadiyanta, 2015) :

1. RTH Publik, yang terdiri atas :
 - Lindung (kecuali cagar budaya);

- Pertanian;
- Taman hijau;
- Fasos/fasum hijau (kebun binatang, Sarana Olahraga, Permakaman, taman hijau)

Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. Dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80% - 90%. ('Kementerian Pekerjaan Umum', 2008)

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Kebijakan Penataan Ruang

A. Undang – Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Undang - Undang Penataan Ruang, 2007)

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Pembentukan RTHKP disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika, pembentukan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan: (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2007).

1. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya disingkat (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Tabel 2.1 Kriteria Ruang Terbuka Hijau

No.	Jenis peraturan dan perundangan-undangan	Definisi Ruang Terbuka Hijau	Definisi Hutan Kota
1.	Undang-Undang No. 26 Tahun 2007	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam	Hutan kota merupakan salah satu bagian dari kawasan ruang terbuka hijau.
2.	PP No. 26/2008	Sama dengan diatas	Sama dengan diatas
3.	PP No. 16 Tahun 2004 (Penatagunaan Tanah)	Salah satu areal yang masuk dalam kriteria kawasan lindung (yang melindungi kawasan dibawahnya	Hutan Kota termasuk ruang terbuka hijau
	PP No. 63/2002	-	Suatu hampan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah

negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Permen PU No. 05/PRT/M/2008 (Pedoman Penye- diaan Pemanfaatan RTH di Ka-wasan Perkotaa	Sama dengan definisi RTH dalam UU No. 26/2006 dan PP No. 26/2007.	Hutan kota merupakan salah satu dari jenis RTH Taman dan Hutan Kota yang masuk dalam katagori RTH publik
--	---	--

(Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan, 2014).

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa antara UU No.26/2006 dan PP No. 26/2007 serta Permen PU No. 05/PRT/M/2008 terlihat konsistensi terkait dengan terminologi dan definisi dari RTH yang digunakan karena memang secara hirarki ketiga peraturan tersebut sangat berkaitan, dimana PP No. 26/2007 merupakan peraturan pelaksanaan (pedoman) dari UU No. 26/2006 dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 merupakan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dari pelaksanaan PP No. 26/2007.